

INTERAKSI FRAKSI DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK

*(Studi Organisasi DPRD Kota Malang 2010, Atas Kasus Pasar Tradisional Dinoyo
dan Blimbing Menjadi Pasar Modern Di Kota Malang)*

Maria Susana Nedo
sandrinanedo@gmail.com

Abstract:

The aim of the study is to describe interaction between fraction DPRD Malang in the decision making process. It is focusing on the analysis of interaction patern both internally and externally during the rebuilding process of Dinoyo and Blimbing traditional market at Malang into modern market. Based on the data, this study conclude that political interaction between the fractions in the parliament shaped invarious forms including: conflict, accommodation, compromise, and the coalition. All of the interation patern was shaped during the process. This study also find dominan factors influence the interaction and decision making process; partie platform, constituen influence, yuridis factor and member power.

Keywords: *Fraction of DPRD II Malang, Interaction and Political Communication, Public Decision*

PENDAHULUAN

Komunikasi Politik adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik, dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya (Galnoor, 1980:32). Masuknya kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik selalu melalui suatu proses interaksi politik, dimana akan terjadi adanya proses akomodasi, kerjasama, kompromi dan konflik kepentingan politik antara salah satu infrastruktur politik (partai politik) dengan infrastruktur politik lainnya. Di Indonesia proses interaksi politik berupa akomodasi, kerjasama, kompromi, konflik kepentingan politik tersebut tidak hanya terjadi ditingkat nasional, tetapi juga terjadi ditingkat regional (propinsi) dan ditingkat lokal (kabupaten dan kota).

Untuk tingkat kota Malang yang hendak disorot dalam penelitian ini adalah Interaksi Politik

antar anggota fraksi dan antar fraksi di DPRD II Malang Tahun 2010-2014; berkaitan dengan pengambilan keputusan kebijakan politik. Penulis hanya fokus pada 2 (dua) kebijakan politik yaitu Proyek Pembangunan Peralihan Status Pasar Tradisional Blimbing dan Dinoyo menjadi pasar Modern di kota Malang. Dinamika internal partai ternyata sedikit banyak ikut menentukan bagaimana posisi masing-masing fraksi (partai politik) di DPRD Kota Malang atas isu politik tertentu. Dinamika internal partai inilah merupakan hasil dan wujud dari interaksi dan komunikasi masing-masing anggota dalam satu fraksi untuk menjaga kepentingan atau platform partai politiknya dengan partai lain sehingga isu politik (Pembangunan pasar modern Blimbing dan Dinoyo) mencapai kesepakatan ditolak (kontra) atau disetujui (pro) oleh DPRD kota Malang sebagai salah satu infrastruktur politik pemerintah

kota Malang.

Rohcek dan Waren (1967 : 189) sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekanto (1990 : 61-64) mengemukakan bahwa interaksi sosial adalah suatu proses timbal balik dimana satu pihak (pribadi atau kelompok) beraksi/bertindak kepada pihak lain dan yang lain beraksi (membalas tindakan).

Interaksi politik berkaitan erat dengan komunikasi politik, komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, serta segala kebijaksanaannya; dengan kata lain interaksi politik berkaitan dengan komunikasi inter dan aktor yang memerintah dan aktor yang memerintah dengan yang diperintah.

Berhubungan dengan hal ini, interaksi politik dapat berupa kerjasama (*corporation*), persaingan (*compositition*), pertikaian (*conflict*). Interaksi politik tersebut dinyatakan dalam bentuk komunikasi politik untuk mencapai tujuan politik. Bentuk komunikasi politik tersebut diantaranya : Retorika, agitasi, publik relation, kampanye dan lobi politik.

Partai politik adalah perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seazaz, sehaluan, setujuan terutama di bidang politik. Menurut Sigmaud Neuman (1963 : 352) sebagaimana dikutip Mariam Budiharjo (2006:162) mendefinisikan partai politik sebagai organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persetujuan dengan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Partai politik memainkan peran sebagai artikulator dan agregator kepentingan masyarakat. (Mariam Budiharjo; 2006: 163-164). Kedua peran yang sangat penting dalam proses pembuatan atau pengambilan kebijakan publik.

Artikulasi kepentingan (*interest articulation*) adalah suatu pendapat yang disampaikan seseorang atau banyak orang pada pihak

pemerintah namun tidak dijadikan suatu kebijakan. Agregasi kepentingan (*Interest Agregation*) adalah suatu penyampaian pendapat yang dilakukan seseorang atau banyak orang dan pendapat itu telah dijadikan suatu kebijakan.

Berbicara tentang partai politik selalu berkaitan erat dengan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat baik ditingkat Nasional, Lokal, (Propinsi) dan Daerah (kecamatan/kota). Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPR/DPRD atau DPRD II berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai jumlah yang ditetapkan.

Makna dan sifat kebijakan publik terlalu luas; Dum (1995: 89) mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan terhadap keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat yang dibuat oleh kantor-kantor dan badan-badan pemerintah.

Kebijakan publik identik dengan kebijakan negara, karena perumusan dan penetapan kebijakan berasal dari dan dilembagakan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah; sebagai pelaksana (abdi) negara. Kebijakan negara harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat (Islawi; (1997:20).

Pembuatan kebijakan publik dilakukan oleh aktor-aktor yang berperan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Terdapat tiga (3) domain atau golongan aktor/pelaku yang terlibat yaitu golongan pemerintah, golongan swasta, dan golongan masyarakat madani (LSM; NGO; Partai Politik; Organisasi Sosial politik) yang masing-masingnya berbeda dalam peran yang dilakukan dalam perumusan kebijakan, nilai serta tujuan yang mereka kejar dari kebijakan tersebut.

Keberadaan fraksi di DPR, DPRD I dan DPRD II selalu berkaitan erat dengan keberadaan partai politik sekaligus dengan fungsi dan peran partai politik dalam mengartikulasi kepentingan dan mengakomodasi kepentingan hingga menjadi suatu kebijakan yang berlaku untuk wilayah tertentu, bisa dirumuskan sebagai

berikut diluar gedung perlemen DPR, DPRD I, DPRD II; Partai Politik adalah golongan masyarakat madani, sebagai salah satu dari tiga domain/golongan aktor kebijakan publik.

Di dalam gedung perlemen DPR, DPRD I, DPRD II; Partai Politik yang memiliki kunci di DPR, DPRD I, DPRD II melalui fraksinya masing-masing dengan bersama fraksi dari partai politik lain adalah infrastruktur negara yang bersama kepala pemerintahan (Daerah, propinsi, kabupaten, kota) terlibat dalam artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan sehingga tercapai suatu rumusan kebijakan publik dari kepentingan masyarakatnya, sesuai aspirasi masyarakat, melalui suatu proses komunikasi dan interaksi politik antar anggota dalam satu fraksi dengan anggota dalam satu fraksi dengan kader dan anggota partai sendiri (secara internal) serta anggota DPRD dalam satu fraksi dengan anggota dewan dari fraksi lain (secara eksternal).

Disitulah terjadi proses akomodasi, kerjasama, kompromi dan konflik kepentingan politik antara infrastruktur politik (partai politik) dengan infrastruktur politik lainnya. Dalam proses penentuan suatu kebijakan ternyata tidaklah cukup bagi fraksi mayoritas hanya dengan memberikan tempat bagi sejumlah pos jabatan dari partai lain lantas berharap bahwa partai lain tersebut akan selalu mendukung kebijakan pemerintah. Dinamika internal partai ternyata sedikit banyak ikut menentukan bagaimana posisi masing-masing partai politik atas sebuah isu politik tertentu.

Pembangunan pasar tradisional Blimbing dan Dinoyo menjadi pasar modern tahun 2010, merupakan dua isu politik yang diambil penulis untuk diteliti dan melakukan kajian ilmiah di DPRD II Kota Malang untuk menemukan interaksi fraksi di DPRD II Kota Malang dalam proses pengambilan kebijakan publik mengenai pembangunan kedua pasar tersebut menjadi pasar modern.

(Kompas. Com. 10 November 2010), ribuan pedagang dua pasar tradisional di Malang

Jawa Timur yakni Pasar Blimbing dan Dinoyo, menyatakan para anggota DPRD setempat berkeinginan dalam pembahasan pesetujuan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Malang dan Investor.

Petugas Hubungan Masyarakat (Humas) peguyuban pedagang pasar Dinoyo; Herwintono di Malang, Senin 4 Oktober 2010, menyatakan pada awal pembahasan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dan Investor, para wakil rakyat berjanji akan memperjuangkan nasib mereka. Pada awalnya ketua peguyuban pedagang pasar dilibatkan bahkan juga dimintai saran mengenai tata letak baru bagi pedagang lama. Namun ketika pembahasan akhir di pemerintahan kota dan sidang paripurna pengesahan persetujuan pedagang ditinggalkan.

Koordinator pasar Blimbing; Subardi, minggu (19 September 2010) mengakui, dirinya dan pedagang lain tidak tahu jika pembahasan revisi perjanjian kerjasama tersebut telah dilakukan antara pihak legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemerintahan kota Malang). “tahu-tahu sudah akan diparipurnakan untuk mendapat persetujuan DPRD dan kami (pedagang-pedagang) tidak ada yang dilibatkan dalam pembahasan revisi. Padahal sebelumnya para wakil rakyat itu berjanji akan selalu melibatkan pedagang”. Ditambahkan pula bahwa usulan pedagang agar investor mengubah site-plan pembangunan pasar Dinoyo ataupun Blimbing apakah diakomodasikan atau tidak juga tak ada kejelasan.” Jika ternyata *site-plan* itu masih tetap, kami tidak akan tinggal diam sebab sangat merugikan kami”.

Fraksi PKS yang menyuarakan dan mendukung *site-plan* kesepakatan bersama antara pemerintah, masyarakat (pedagang), dan pengusaha berubah disaat-saat terakhir meskipun lobi politik secara politik secara intens dilakukan menjelang pemungutan suara.

Fraksi demokrat yang awalnya memberi dukungan kepada masyarakat (pedagang tradisional) justru mengkhianati pedagang dan

akhirnya mendukung dengan memberikan persetujuan atas pembangunan pasar tradisional menjadi pasar modern.

Proyek pembangunan pasar tradisional Dinoyo dan pasar Blimbing menjadi pasar modern masuk dalam ranah kebijakan publik karena menyangkut kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat terutama pedagang di kota Malang. Interaksi fraksi di DPRD kota Malang dalam proses pengambilan keputusan tentang pembangunan pasar modern Blimbing dan Dinoyo inilah yang dijadikan objek penelitian dan kajian yang akan ditelaah penulis.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan desain Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan mendatangi langsung mewawancarai, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi alamiah (Creswell, 1998:15). Desain penelitian yang digunakan adalah sebuah studi yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan interaksi fraksi anggota partai politik di DPRD II Kota Malang dalam proses pengambilan kebijakan publik khusus menyangkut pembangunan pasar modern Dinoyo dan Blimbing di kota Malang.

2. Fokus Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kota Malang selama 4 (empat bulan) mulai bulan Juni sampai bulan Oktober tahun 2009. Fokus penelitian adalah interaksi Partai Politik (fraksi) DPRD II Kota Malang dalam proses pengambilan kebijakan publik pembangunan pasar modern Dinoyo dan Blimbing. Peneliti menggunakan 2 indikator yaitu bentuk interaksi fraksi dan proses pembuatan dan pengambilan kebijakan publik; keduanya berhubungan dengan pembangunan kedua pasar di kota Malang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan metode wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD pemerintahan kota Malang periode 2009 – 2014, yang berjumlah 45 orang. Sedangkan sampel yang diambil minimal 3 orang dari masing-masing partai politik dan maksimal 5 orang dengan partai atau fraksi yang berbeda yang ada dalam organisasi DPRD kota Malang.

Peneliti menggunakan *purposive sampling method* untuk pengambilan sampel sumber data. Pengambilan sampling tidak secara acak dalam *purposive sampling method*, sampel yang diambil dipilih dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono; 2005 : 54)

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dengan populasi dan sampel anggota DPRD Kota Malang adalah kantor DPRD II Kota Malang, jalan Tugu No. 1 Malang.

HASIL PENELITIAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga legislative daerah yang mana dalam pelaksanaan tugasnya harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan antara lain : Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, maka DPRD Kota Malang berfungsi sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan Daerah bersama Kepala Daerah.

Sebagaimana Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang mempunyai visi dan misi (profil DPRD Kota Malang Periode 2009-2014, Sekretaris DPRD Kota Malang: 2009) sebagai berikut: Visi: Terjaminnya Aparatur Politis yang Kualitatif, Aspiratif dan Prespektif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Dengan misinya antara lain: Mewujudkan anggota DPRD yang berwawasan luas, memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi; Mewujudkan DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat yang responsive, solutif, dan aplikatif; Mewujudkan peran konkrit DPRD terhadap kemajuan dan perkembangan kota serta kesejahteraan masyarakat.

Apabila kita melihat dinamika politik di kota Malang bahwa kesadaran politik semakin baik, artinya masyarakat melek politik yang dibuktikan dengan partisipasi masyarakat dalam kanca politik local maupun nasional menunjukkan indikasi yang signifikan. Salah satu contoh banyak parpol (partai politik) yang muncul di kota Malang ataupun Malang Raya. Partai politik yang lolos verifikasi KPUD Kota Malang sebanyak 38 partai politik yang mengikuti Pemilu tahun 2009 dengan partai yang menang dan mendapatkan kursi di DPRD sebanyak 10 partai politik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang memiliki 7 fraksi yang merupakan pengelompokan anggota dewan berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai jumlah yang diperoleh atau fraksi merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik pemilihan umum.

Sajian dan analisis data ini didasarkan pada rumusan masalah dan pengembangan berdasarkan temuan dilapangan tentang interaksi fraksi (partai politik) dalam proses pengambilan kebijakan publik pembangunan pasar modern Blimbing dan Dinoyo di kota Malang oleh DPRD II Kota Malang periode 2009-2014. Berhubungan dengan hal ini, interaksi

politik dapat berupa kerjasama (*corporation*), persaingan (*compotition*), pertikaian (*conflict*). Interaksi politik tersebut dinyatakan dalam bentuk komunikasi politik untuk mencapai tujuan politik. Bentuk komunikasi politik tersebut diantaranya : Retorika, agitasi, publik relation, kampanye dan lobi politik.

Pada Pemilihan umum 2009, terdapat kurang lebih 38 partai politik yang lolos verifikasi KPUD Kota Malang untuk mengikuti pemilihan umum. Dari jumlah tersebut partai yang memenangkan dan mendapatkan kursi di DPRD II Kota Malang sebanyak 10 partai politik yang menduduki 45 kursi yang disediakan di DPRD II Kota Malang. Berdasarkan pasal 26 dan 27 Tatib DPRD II Kota Malang tentang fraksi di DPRD; dibentuk 7 fraksi DPRD: 5 fraksi yang semuanya adalah anggota dari partai politik yang sama (Demokrat; PKB; PKS; Golkar; dan PAN) dan 2 fraksi gabungan dari partai politik yang berbeda; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan dan Partai Karya Peduli Bangsa serta Fraksi Nurani Damai, yang adalah gabungan dari anggota Partai Politik Gerindra; Hanura dan Partai Damai Sejahtera.

Interaksi politik antar anggota Dewan dalam suatu partai politik atau fraksi di DPRD II Kota Malang menurut hasil penelitaian dapat diklasifikasikan dalam bentuk interaksi politik asosiatif yaitu akomodasi dengan berbagai bentuk seperti coercion; bentuk akomodasi karena adanya paksaan. Compromise dimana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutan mereka agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada; Arbitration, atau kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri dan berbagai bentuk interaksi akomodasi lainnya. Sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto (1990:77).

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan anggota DPRD II Kota Malang dari berbagai fraksi yang ada dalam lembaga tersebut seperti yang dikutip: Sutiaji (FPKB) Menyatakan bahwa:

“proses pengambilan kebijakan publik adalah visi, misi yang secara utuh dari partai kami. Kalau arahan DPP, DPC, Ketua Fraksi, Politisi Senior hanya sebatas masukan yang harus dipertimbangkan, seandainya ada perbedaan pendapat di dalam fraksi itu sendiri tentu ketua fraksi harus memahami mereka dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga mencapai titik temu dan akhirnya memiliki pandangan yang sama”. Catatan: Fransiska FPD; Menyatakan “Perlu kita ingat bahwa sudah ada pakem, fraksi itu adalah kepanjangan tangan dari partai politik. Tentu jika sudah ada keputusan dari partai politik fraksi harus menjalankannya, jika ada perbedaan pendapat semuanya harus diselesaikan dengan musyawarah dalam internal fraksi untuk mencari titik temu; dan masalah tersebut menjadi rahasia dalam fraksi itu sendiri dan tidak sampai kepada pihak-pihak lain (informasi itu tidak sampai diluar apalagi kepada fraksi lain”).

Sofian Edi Jarwoko (FPG) kita memiliki mekanisme rapat artinya semua perbedaan yang terjadi baik didalam fraksi maupun di dewan kita selalu menggunakan musyawarah untuk mencari titik temu dengan setiap anggota yang berbeda pendapat atau pandangan. Tentu pandangan ketua fraksi, pandangan ketua DPC/DPD partai mengenai suatu kebijakan public dan pengaruh pandangan DPP partai tentu ada pengaruhnya akan tetapi kita harus melihat permasalahan seperti apa. Artinya semua pandangan itu tentu akan diterima dan kita akan jadikan sebagai masukan dalam proses pengambilan kebijakan. Jika dalam fraksi sendiri terjadi perbedaan pendapat tentu kita (fraksi) harus mengakomodir pandangan tersebut. diperoleh suatu pandangan fraksi bahwa perbedaan pendapat dalam suatu fraksi mengenai pengambilan keputusan suatu kebijakan public maka perbedaan tersebut harus diakomodir dan dicari titik temu untuk memperoleh jalan keluarnya. Selain itu pendapat anggota fraksi harus sejalan dengan platform partai. Dengan demikian Alur proses pembuatan

kebijakan di DPRD II Kota Malang adalah sebagai berikut ada masalah, diusulkan oleh pemerintah (eksekutif dan atau DPRD), meminta pandangan atau pendapat fraksi, asal usul pembuatan kebijakan; rapat internal fraksi (ada usulan anggota); pandangan fraksi, siding paripurna yang menghasilkan keputusan DPRD Kota Malang dan kemudian keputusan itu disosialisasikan kepada anggota dewan secara keseluruhan dan kepada masyarakat kota Malang (Indra Tjahyono; Fraksi Demokrat). Pada tahap ini proses pemilihan dan pengambilan suatu kebijakan akan terjadi dengan melalui mekanisme-mekanisme dalam penemuan kelebihan dan kekurangannya serta konsekuensi-konsekuensi dari sebuah kebijakan yang akan diambil dari beberapa alternative yang telah ada. (Sofian Edi Jarwoko; Fraksi Partai Golkar) mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat akan mensejahterakan rakyat atau tidak. Hal ini harus melihat dengan proses pembuatan keputusan tentang suatu kebijakan menyetujui semangat kekerjaan kepada masyarakat dan pembangunan suatu bangsa. Rusmuji dari Fraksi PKB menyatakan bahwa perlu diketahui bahwa kebijakan itu harus konsisten dalam memanusiaikan manusia dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dan kebijakan itu ada 3 kepentingan yaitu kebijakan kepentingan partai yang harus disepakati oleh semua anggota dan fraksi harus tunduk kepada kebijakan partai; kebijakan internal fraksi (forum fraksi yang membahas kembali kebijakan dari partai apakah dilaksanakan atau dipertimbangkan terlebih dahulu). Kebijakan dari partai tidak serta merta harus dilaksanakan akan tetapi kita harus melihat momen waktu yang tepat baru kita goalkan istilahnya. Dan Kebijakan kepentingan Dewan (kolektif kolegiel). Chairul Amri Fraksi PKS mempertegas dengan menyatakan bahwa kita harus melihat permasalahan dan kebijakan seperti apa dulu dalam arti melihat nilai kemenfaatannya dan sensitifitas suatu kebijakan

atau permasalahan ditingkat masyarakat (tingkat krusial suatu permasalahan atau kebijakan tersebut) atau dalam bahasa anggota dewan melihat output dan outcome dari suatu kebijakan atau keputusan yang akan dibuat.

Pada umumnya semua fraksi di DPRD II Kota Malang menyatakan bahwa melakukan lobi, meyakinkan fraksi lain dengan materi kajian yang memadai dengan fraksi lain adalah bentuk interaksi yang dilakukan suatu fraksi untuk memperjuangkan suatu kebijakan public. Hal ini terungkap dalam pernyataan Chairul Amri (FPKS).

Untuk mencari dukungan agar suatu kebijakan dapat digoalkan interaksi yang sering dilakukan di DPRD Kota Malang adalah melakukan lobi, meyakinkan fraksi lain dengan materi kajian yang memadai. Tentu dalam meyakinkan fraksi lain kita harus menguasai permasalahan yang terjadi sehingga pandangan fraksi kita dapat diterima oleh fraksi lain dan tentu kerjasama ini harus simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) selain pemanfaatan dari kebijakan itu untuk kepentingan masyarakat (public interest). Lobi-lobi politik antar fraksi ini tentu dilakukan untuk mencari titik temu dan pelurusan pandangan serta penyatuan pandangan agar terjadi pandangan yang sama terhadap suatu permasalahan atau suatu kebijakan yang akan digoalkan. Tentu lobi-lobi politik ini adalah rapat yang dilakukan oleh beberapa oknum politisi dalam acara yang tidak formal (non formal). Akan tetapi perjuangan fraksi-fraksi terhadap suatu kebijakan tentu dilakukan dalam rapat formal seperti rapat pimpinan atau rapat gabungan pimpinan.

Indra Tjahyono (FPD) menyatakan dalam proses pembuat suatu keputusan tentu itu sudah diatur dalam mekanisme rapat partai, fraksi ataupun dewan. Interaksi yang sering digunakan di DPRD II Kota Malang dalam proses pengambilan suatu kebijakan public adalah lobi-lobi politik. Hal ini jika terjadi terdapat perbedaan

kepentingan dan pendapat dalam memperjuangkan kebijakan tersebut.

Interaksi politik berkaitandengan lobi internal dan eksternal fraksi juga dilakukan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terhadap pelaksanaan lobi di FPKB; Rasmuji (FPKB) menyatakan seandainya ada perbedaan pendapat di dalam fraksi, ketua fraksi harus memahami mereka dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga mencapai titik temu. Jika terdapat perbedaan antara fraksi kita akan melakukan lobi dan rasionalisasi kepada fraksi-fraksi lain, fraksi mayoritas, pimpinan dewan, pimpinan sidang, penguasaan materi, dan tuntutan masyarakat.

Dari hasil wawancara, bisa disimpulkan bahwa lobi eksternal dan internal partai merupakan mekanisme dan bentuk interaksi yang lazim dilakukan oleh fraksi di DPRD II Kota Malang, baik internal fraksi maupun antar fraksi. Lobi dilakukan jika terdapat perbedaan pendapat yang berkaitan dengan bentuk interaksi internal dan antar fraksi seperti; persaingan, kontroversi, pertikaian, dan akomodasi. Dengan lobi, sikap dan pandangan yang berbeda diakomodir bukan diabaikan, melalui lobi terjadi kesepakatan-kesepakatan tertentu antar anggota fraksi atau antar fraksi dimana inti pandangannya diambil kemudian dirumuskan dalam bahasa yang berbeda yang menjadi keputusan partai atau fraksi.

Perkembangan dengan isu politik pembangunan pasar Dinoyo dan Blimbing Malang, sebagai pasar Modern; Pola interaksi fraksi (partai) untuk merumuskan kebijakan tersebut dapat terlihat dari temuan peneliti dan hasil wawancara penulis dengan beberapa fraksi.

Empat (4) fraksi (Fraksi PAN; Fraksi PKS; Fraksi PKB; Fraksi Gabungan Gerakan Nurani Damai) adalah fraksi yang menolak kerjasama Pemerintahan Kota Malang dengan investor Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Dinoyo dan Blimbing.

Meski menyetujui, fraksi Demokrat pada

awalnya cukup aspiratif dan responsive terhadap aspirasi pedagang. Fraksi Gabungan PDIP, Partai Karia Peduli Bangsa dan Partai Golkar; yang menyetujui langsung kerjasama Pemerintah Kota Malang di pihak investor dalam pembangunan kedua pasar modern tersebut. Alasan persetujuan kerjasama dapat dilihat dengan pernyataan berikut; Syofian Edi Jarwoko (FPG) Menyatakan sepakat dibangun, karena dengan membangun pasar Dinoyo menjadi pasar modern tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para pedagang khususnya. Alasannya pembangunan pasar Dinoyo sehingga diajukan kepada DPRD Kota Malang bahwa eksekutif tidak punya duit supaya diusulkan untuk mencari pihak ketiga untuk melakukan kerjasama dengan cara dilelang secara umum (melakukan tender yang dimenangkan oleh salah satu investor). Akan tetapi pembangunan pasar Dinoyo dan Blimbing memunculkan pro dan kontra di DPRD kota Malang. Apabila dalam waktu-waktu pembahasan rancangan tersebut tidak mendapat kesepakatan dan sudah lewat 45 hari sejak terhitung rancangan itu diusulkan ke dewan. Dalam waktu yang ditentukan dalam aturan DPRD Kota Malang tersebut tidak terpenuhi maka kita serahkan kepada eksekutif untuk tetap menjalankan keputusan tersebut dengan tetap membangun Pasar Dinoyo. Dengan menambahkan bahwa FPG tidak memiliki kepentingan partai dalam pembangunan kedua pasar tersebut yang ada ialah dari kepentingan masyarakat. Indra Tjahyono (Fraksi Demokrat) menyatakan tentu fraksi merasa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang pro rakyat. Ada 3 fraksi yang menyetujui terhadap kebijakan pembangunan pasar Dinoyo dengan syarat pembangunan itu untuk mensejahterakan masyarakat warga kota Malang. Bahwa Kebijakan pembangunan pasar Dinoyo tersebut sudah sesuai dengan keinginan pedagang, yang belum disepakati itu terkait dengan site plan. Kami sudah melakukan sosialisasi kebijakan itu kepada

pedagang dan masyarakat kota Malang (orang-orang yang berketingan). Tentu pandangan fraksi harus sebijak mungkin dalam mengambil sikap terhadap suatu permasalahan. Dalam pengertian intinya sama dengan pandangan-pandangan ketiga fraksi yang lain, bahwa kebijakan ini pro pada masyarakat.

Fraksi-fraksi yang menolak kerjasama Pemkot Malang dengan Investor pembangunan pasar modern juga memilih alasan yang sama untuk kepentingan rakyat sebagai alasan penolakan kerjasama Pemkot Malang dengan Investor; hal ini tertuang dalam pernyataan: Sutiaji (FPKB) menyatakan “Fraksi berkomitmen tinggi dalam kasus ini dan fraksi PKB belum memiliki pandangan tersebut atas dasar bahwa pembangunan pasar Dinoyo sangat merugikan masyarakat. Ada tiga elemen besar dan penting yang harus diperjuangkan yaitu objek (kebijakan dan DPRD sebagai representasi dari masyarakat), lingkungan (masyarakat umum), dan pengguna (pedagang). Untuk menunjukkan sikap komitmen mereka (fraksi PKB) terhadap aspirasi masyarakat secara umum dan pedagang pasar Dinoyo secara khusus, kami akan mengusulkan pembentukan PANSUS (Panitia Khusus Pembangunan Pasar Dinoyo) sebagai pengontrol terhadap pelaksanaan (implementasi) pembangunan pasar Dinoyo; dan pandangan ini menjadi isu sentral yang sedang dibicarakan ditingkat internal fraksi dan sudah ada kesepakatan dan akan disosialisasikan kepada fraksi-fraksi lain yang sependangan dengan fraksi PKB atau tidak. Choirul Amri (FPKS) menyatakan “terkait kebijakan pembangunan pasar Dinoyo fraksi kami tetap konsisten pada pandangan kami, apakah pasar tersebut memberikan keuntungan bagi rakyat, pasar itu menfaat bagi rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat dan jika kita membicarakan perubahan pandangan fraksi-fraksi secara umum, dipengaruhi oleh fraksi itu mendapatkan data-data terbaru yang dapat dipertanggungjawabkan.”

PEMBAHASAN

Interaksi politik atau komunikasi politik merupakan cara-cara berhubungan (relasi politik) yang dapat dilihat apabila orang perorang dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan system serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Artinya interaksi politik atau komunikasi politik adalah kunci semua kehidupan social politik, tidak ada interaksi berate tidak ada juga kehidupan bersama (sosio-politik). Dalam alur proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik inilah fraksi di DPRD kota Malang berinteraksi secara internal dalam fraksi masing-masing dan eksternal fraksi dengan fraksi lain dan pejabat eksekutif walikota dan SKPD terkait serta pihak swasta dan masyarakat, LSM, dan lain-lain. Dimana dalam proses ini yang menjadi tujuang utama adalah kepentingan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pedagang pasar tradisional Dinoyo dan pasar Blimbing.

Interaksi politik berkaitan erat dengan komunikasi politik, komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, serta segala kebijaksanaannya; dengan kata lain interaksi politik berkaitan dengan komunikasi in-ter dan aktor yang memerintah dan aktor yang memerintah dengan yang diperintah. Secara konkrit dalam praktek interaksi politik yang dilakukan oleh partai politik bersama kadernya termasuk anggota legislative yang bertugas memperjuangkan kepentingan partainya dan menguasai pemerintahan, merebut dukungan dari masyarakat melalui pengambilan kebijakan public. Dengan demikian menurut Sigmund Neumann (1963 : 352) sebagaimana dikutip oleh (Mariam Budiardjo, 2006 : 162) mengemukakan defenisi partai politik sebagai organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan

rakyat atas dasar persaingan dengan suatu kelompok atau kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Hal ini menunjukkan adanya bentuk interaksi politik dalam bentuk: akomodasi khususnya: coercion dan compromise. Coercion karena adanya paksaan dimana setiap anggota fraksi harus tunduk pada AD/ART Partai dan platform partai. Sedangkan Compromise ditunjukan adanya penyelesaian untuk mencari titik temu sehingga diperoleh suatu pandangan fraksi. Dengan demikian apa yang diungkapkan oleh Anderson sebagaimana dikutip oleh Islami (1997:19) mengatakan bahwa kebijakan Negara adalah kebijakan yang dilembagakan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Maka menurut Islami (1997 :20) bahwa kebijakan Negara (public policy) merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tindakan dilaksanakan oleh pemerintahan yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Proses pengambilan atau pembuatan keputusan dalam teori pengambilan kebijakan publik terdapat 3 (tiga) domain/golongan (pelaku) yang terlibat yakni golongan pemerintah, golongan swasta dan golongan masyarakat madani (Partai Politik, LSM, organisasi Sosial, Mahasiswa dll). Dalam teori Keperintahan yang baik (Good Governance) menurut PP No. 101 tahun 2000 adalah keperintahan yang mengemban dan menerapkan prinsip-prinsip professional, akuntabelitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Maka model yang cocok dalam proses membuat kebijakan public adalah model kelompok yang mana abstraksi dari proses pembuatan kebijakan yang didalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.

Partai politik memainkan peran sebagai artikulator dan agregator kepentingan

masyarakat. (Mariam Budiharjo; 2006: 163 – 164). Kedua peran yang sangat penting dalam proses pembuatan atau pengambilan kebijakan publik.

Artikulasi kepentingan (interest articulation) adalah suatu pendapat yang disampaikan seseorang atau banyak orang pada pihak pemerintah namun tidak dijadikan suatu kebijakan. Agregasi kepentingan (Interest Agregation) adalah suatu penyampaian pendapat yang dilakukan seseorang atau banyak orang dan pendapat itu telah dijadikan suatu kebijakan.

Dari konsep interaksi politik, fungsi partai politik dan bentuk-bentuk interaksi politik tersebut dapat kita temukan interaksi politik dalam satu partai (fraksi) dan antar partai politik (fraksi) dalam perumusan kebijakan public di kota Malang, khususnya mengenai kebijakan pembangunan pasar Dinoyo dan Blimbing yang dapat peneliti kelompokkan dalam 3 bentuk interaksi yaitu akomodasi, oposisi dan kerjasama. Bentuk interaksi antar anggota DPRD suatu partai politik/fraksi di DPRD Kota Malang dapat dilihat dalam pernyataan Sutiaji yang mengatakan “ yang menjadi faktor utama dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah visi dan misi yang secara utuh dari partai kami. Kalau arahan DPP,DPC, Ketua fraksi, politisi senior hanya sebatas masukan yang harus dipertingkan, seandainya ada perbedaan pendapat didalam fraksi itu sendiri tentu ketua fraksi harus memahami mereka dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga mencapai titik temu dan akhirnya memiliki padangan yang sama.

Dalam interaksi suatu partai atau fraksi dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk proses pengambilan keputusan mengenai suatu kebijakan pembangunan pasar tradisional Dinoyo dan Pasar Blimbing menjadi pasar modern antara lain: Platform partai; Tuntutan Masyarakat (Konstituen atau pemilih) khususnya pedagang pasar tradisional Dinoyo dan Blimbing; Penguasaan terhadap suatu masalah; perean anggota dalam

komisi di dewan; Pengaruh Politisi senior; Pandangan ketua DPP, DPD, DPC atau anggota Fraksi; Pengaruh Pandangan eksekutif terhadap kebijakan; Adofsi data atau informasi yang berpihak pada masyarakat; faktor yuridis yang tidak melanggar aturan lainnya; faktor sosial politik/stabilitas politik yang lebih baik dan adil merata bagi masyarakat ; faktor ekonomi yang berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan; Pertumbuhan sosial yang lebih baik, keamanan lingkungan, stabilitas sosial politik dan dukungan publik.

Dalam proses interaksi ada 2 (dua) unsur penting yang harus kita pahami yaitu kontak dan komunikasi, maka dalam melakukan interaksi politik orang melakukan kontak dan komunikasi mengenai peristiwa atau permasalahan-permasalahan baik yang sifatnya konkrit ataupun abstrak untuk memperoleh satu tujuan tertentu.

Menurut Rusadi Kantaprawira (1983) sebagaimana dikutip oleh Hami M. Hikmat, (2010 : 36) mendefinisikan komunikasi politik adalah untuk menghubungkan system politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran internal golongan, instansi, asosiasi maupun sektor kehidupan politik pemerintah.

Dua (2) fenomena yang menarik untuk dijadikan kajian penelitian dalam menemukan interaksi fraksi dalam proses pengambilan kebijakan publik oleh DPRD II Kota Malang dalam pembangunan pasar modern Blimbing dan Dinoyo berdasarkan panangan diatas adalah sikap partai Demokrat yang pada awalnya menolak kebijakan pembangunan pasar Dinoyo namun menjelang putusan akhir DPRD; Fraksi Demokrat mendukung pandangan fraksi PDIP, Gerindra. Awalnya fraksi Partai Demokrat cukup aspiratif dan responsive terhadap aspirasi pedagang tetapi dalam rapat pleno, mereka justru menyetujui kerjasama tersebut (Sutrisno; sebagaimana dikutip oleh Kompas Com. 10 Januari 2011).

Menurut Kooiman (1993 : 251) sebagaimana dikutip oleh Sedermayanti (2004 : 39-51) mengatakan diperlukan adanya konfigurasi atau kesearahan tujuan dan kepentingan untuk menghasilkan dampak yang bersifat sinergis atau situasi “menang-menang” (*win-win solution*). Kooiman merekomendasikan bahwa orientasi internal dan eksternal bagi organisasi pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat penting dan strategis.

Perubahan sikap fraksi Partai Demokrat tersebut menunjukkan adanya interaksi politik antara Fraksi PDIP; Fraksi Gabungan Partai Golkar dan Partai Karya Peduli Bangsa dengan Fraksi Partai Demokrat. Seperti diungkapkan Indra Tjahyono ketua Fraksi Partai Demokrat Kota Malang Periode 2009-2014 yang diwawancarai tanggal 21 Januari 2011 menyatakan : tentunya fraksi merasa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang pro-kontra. Ada tiga fraksi menyatakan menyetujui terhadap kebijakan pembangunan pasar Dinoyo dengan syarat pembangunan pasar Dinoyo tersebut sudah sesuai dengan keinginan pedagang; yang belum disepakati itu terkait dengan site plan. Kami sudah melakukan sosialisasi kebijakan pada pedagang dan masyarakat kota Malang. Tentu pandangan fraksi harus sebijak mungkin dalam mengambil sikap terhadap suatu permasalahan, artinya intinya sama dengan pandangan-pandangan ketiga fraksi lain, bahwa kebijakan ini pro pada masyarakat’ menunjukkan perubahan pandangan fraksi partai demokrat setelah melalui proses lobi dan konsolidasi politik sehingga bekerjasama dengan fraksi partai gabungan dan fraksi PDIP untuk menyetujui kebijakan pembangunan pasar Dinoyo dan Blimbing sebagai Pasar Modern.

Tetap adanya lobi politik yang dilakukan Golkar dengan fraksi lain terutama Fraksi demokrat; dapat ditafsirkan melalui pernyataan Sofyan Edi Jarwoko dari Fraksi Partai Golkar tentang adanya kerjasama politik tersebut “tentu kita akan tetap siap berjuang dengan melakukan

lobi-lobi dan komunikasi yang intens antara fraksi dalam mencari dukungan dengan menjadikan koalisi ataupun kerjasama untuk menggolkan suatu kebijakan tersebut.

Interaksi fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Malang dengan Fraksi PDIP dan Fraksi Gabungan Fraksi Golkar dan Partai Karya Peduli Bangsa dengan melobi secara internal fraksi dan dilobi serta melobi ketua fraksi lain yang akhirnya menang dalam menggolkan kebijakan pembangunan pasar Dinoyo dan Blimbing menjadi pasar Modern, dengan memenangkan Voting dengan memperoleh 27 suara dari 45 suara (Kompas Com. 05 Oktober 2010) boleh dikatakan sebagai bentuk interaksi kerjasama (*cooperation*).

Fenomena kedua adalah sikap oposisi dengan menjadi pengontrol atas pelaksanaan kebijakan pembangunan kedua pasar tersebut, setelah kalah dalam voting. Sikap ini tertuang dalam pernyataan Sutiaji, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam wawancara 21 Januari 2011), menyatakan “untuk menyatakan sikap komitmen fraksi PKB terhadap aspirasi masyarakat secara umum dan pedagang pasar Dinoyo dan Blimbing khususnya kami akan mengusulkan pembentukan PANSUS (Panitia Khusus Pembangunan Pasar Dinoyo dan Blimbing) sebagai pengontrol terhadap implementasi pembangunan pasar. Pandangan ini sudah menjadi isu sentral yang sedang dibicarakan ditingkatan internal partai dan sudah ada kesepakatan kepada fraksi-fraksi lain yang sependangan dengan fraksi PKB atau tidak.”

Sikap oposisi setelah kalah dalam voting ditunjukkan oleh fraksi PKS, yang sejak awal sampai saat akhir pelaksanaan voting tetap menolak kebijakan pembangunan pasar modern tersebut karena tidak sesuai site plan dipertimbangkan keuntungan bagi rakyat atas pembangunan pasar modern tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Choirul Amri, ketua PKS, 20 Januari 2011), menyatakan “fraksi kami akan tetap

menjadi oposisi untuk mengontrol pelaksanaan kebijakan pembangunan pasar modern”.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa secara pribadi ditingkat fraksi ada anggota yang tidak sejalan dengan penolakan fraksi atas pembangunan pasar modern tersebut baik dari Fraksi PKB; Fraksi PKS; Fraksi PAN. Tentunya lobi politik untuk mengedepankan platform partai sebagai alasan menolak kebijakan tersebut dilakukan internal partai dan eksternal partai baik yang sehaluan menolak atau partai yang mendukung. Interaksi politik untuk menolak pembangunan pasar modern tersebut diteruskan setelah Fraksi PKS, Fraksi PKB dan Fraksi PAN kalah dalam voting dan harus menerima keputusan menyetujui pembangunan pasar modern tersebut mengatasnamakan salah satu infrastruktur pembuatan/pengambil kebijakan yaitu DPRD Kota Malang membentuk pansus sebagai pengontrol terhadap pelaksanaan pembangunan pasar Dinoyo dan Blimbing adalah bahasa dan tindakan politis untuk suatu kebijakan yang sebelumnya ditolak dilevel partai tetapi pada level institusi DPRD disetujui untuk dijalankan melalui mekanisme voting atau perubahan sikap partai ditingkat rapat paripurna.

KESIMPULAN

Dalam proses pengambilan kebijakan politik di DPRD II Kota Malang setiap fraksi (partai politik atau gabungan beberapa partai politik) mengadakan interaksi politik baik tingkat internal fraksi maupun eksternal (dengan fraksi lain) dengan melakukan kontak dan komunikasi untuk mencapai kesepakatan melalui mekanisme dan kesepakatan bersama. Ditingkat internal; fraksi harus menghargai dan mengakomodir pandangan masing-masing anggota fraksi dengan ketentuan harus sejalan dengan AD/ART serta platform partai sehingga menghasilkan pandangan fraksi atas suatu isu politik untuk disampaikan pada paripurna.

Ditingkat eksternal partai interaksi politik antar partai terjadi pada level ini sampai terjadi

perubahan pandangan fraksi sebagai hasil lobi politik interaksi politik baik dalam bentuk kerja sama (pro atas kebijakan).

Baik interaksi tingkat internal partai maupun eksternal antar partai politik mewujudkan adanya bentuk akomodasi khususnya coercion (karena adanya paksaan) dan compromise (kompromi) baik karena tuntutan platform partai atau karena hasil lobi dari fraksi/partai lain. Saat keputusan DPRD II Kota Malang tentang suatu kebijakan, kelihatan hasil lobi antar fraksi baik dalam bentuk kerjasama (pro kebijakan) maupun oposisi (kontra kebijakan).

Interaksi fraksi dalam proses pengambilan kebijakan public tentang pembangunan pasar modern Blimbing dan Dinoyo. Berdasarkan data dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan ada 2 (dua) bentuk interaksi antara partai politik atau fraksi di DPRD II Kota Malang berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan

1. Oposisi (opposition)

Partai politik (fraksi) melakukan oposisi terhadap keputusan akhir kebijakan pembangunan pasar Blimbing dan Dinoyo (Fraksi Partai Kasih Sejahtera dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)

2. Kerjasama (Cooperation)

Partai politik (Fraksi) melakukan kerjasama untuk mendukung keputusan akhir kebijakan pembangunan pasar Blimbing dan pasar Dinoyo. (Fraksi Partai Demokrat; Fraksi Partai Golkar; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

Selain kedua point tersebut peneliti menemukan factor-factoryang mempengaruhi bentuk interaksi dan pengambilan keputusan mengenai suatu kebijakan public. Dari sekian banyak banyak factor terdapat beberapa factor dominan diantaranya: platform partai, tuntutan masyarakat (konstituen/pemilih); pengaruh politisi senior; factor yuridis (melanggar atau tidak sesuai aturan UUD, UU Perda dan aturan lainnya), penguasaan anggota dewan terhadap suatu masalah dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar Saifuddin, 2009, "Metode Penelitian", Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Budiardjo Mariam, 2006, "Dasar-dasar Ilmu Politik", PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dunn, N. William, 2003. "Analisis Kebijakan Publik", PT. Hanindita Graha Widya. Yogyakarta.
- Hikmat M. Mahi, 2010, "Komunikasi Politik", Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 1992, "Analisis Data Kualitatif". Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong Lexy J, 1989, "Metodologi Penelitian Kualitatif", PT. Ramaja Rosdakarya. Bandung.
- Nimon Dan. 2000, "Komunikasi Politik", PT. Ramaja Rosdakarya. Bandung
- Rauf, Maswadi, Partai Sjarikat Islam Indonesia, 1965 – 1970, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Indonesia. Djakarta : 1971
- Rush Michael dan Althoff Phillip, 2007, "Pengantar Sosiologi Politik", Rajawali Pers. Jakarta.
- Sedarmayanti, 2004, "Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)", CV. Mandar Maju. Bandung.
- Sevilla, Consuelo, G. 1993, "Pengantar Metode Penelitian", Diterjemahkan Oleh Alimuddin Tuwu, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto Soerjono, 1990, "Sosiologi Suatu Pengantar", PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono, 2005, "Memahami Penelitian Kualitatif", Alfabeta. Bandung.
- Sumarno AP, 1989, "Dimensi-dimensi Komunikasi", Citra Aditya Bahakti. Bandung.
- Thoha Miftah, 2003, "Birokrasi dan Politik di Indonesia", PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wahab Abdul Solichin, 2010, "Analisis Kebijakan", Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara", Bumi Aksara. Jakarta.

Sumber – sumber lain:

- Abdul Salam, 2009, "Sistem Politik dan Sistem Komunikasi", Sumber: <http://abdulsalamserba.komunikasi.blogspot.com/sitem-politik-dan-sistem-komunikasi.html> diakses pada 19 Oktober 2010
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 01 Tahun 2010 tentang "Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang", 2011 Sekretaris DPRD Kota Malang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang “Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang”, 2006 Sekretaris DPRD Kota Malang

Hasil wawancara (interview), pada 17-13 Januari 2011, di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang

<http://regional.kompas.com/read/2010/09/19/> di akses pada tanggal 05 Oktober 2010

<http://dyogi-miyosa.blog.friendster.com> 12 juni 2006, “Artikulasi kepentingan dan Agregasi Kepentingan/ diakses pada tanggal 26 November 2010”

<http://regional.kompas.com/read/2010/10/05/DPRD.Setujui.Pasar.Tradisional.Jadi.Mal> diakses pada tanggal 10 November 2010

http://www.dpppkb.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3307:dprd-setujui-pasar-blimbing-a-dinoyo-dibangun&catid=48:daerah&Itemid=120 diakses 10 Januari 2011

Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.Masa Bakti 2009 – 2014, 2009, Sekretaris DPRD Kota Malang.